

Manajemen Pendidikan Inklusif di Negara Berkembang: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Multikultural

Nanda Nur Hafizah, Riyuzen Praja Tuala Oki Dermawan

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung

E-mail: nandanurhafizah354@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the implementation of inclusive education management in developing countries with multicultural backgrounds, particularly in Indonesia, Malaysia and India. Inclusive education, which emphasizes providing equal opportunities for all learners without exception, including those who have special needs or come from diverse social and cultural backgrounds, is faced with various challenges in these developing countries. The method used in this study is Systematic Literature Review (SLR), by analyzing 35 relevant articles obtained from various sources, such as Scopus, Taylor & Francis, ScienceDirect, and Google Scholar. This study identified various obstacles in the implementation of inclusive education, such as access gaps, infrastructure limitations, lack of teacher training, social stigma, and language and curriculum barriers. However, there are great opportunities to improve the effectiveness of inclusive education through policy strengthening, technology utilization, synergy between government and society, and more flexible curriculum reforms. This research makes an important contribution to the literature on inclusive education in developing countries and offers strategic recommendations to improve the sustainability and equity of access to inclusive education in countries with complex cultural and ethnic diversity.

Keywords: Inclusive Education Management; Developing Countries; Multiculturalism

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen pendidikan inklusif di negara-negara berkembang dengan latar belakang multikultural, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan India. Pendidikan inklusif, yang menekankan pada pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam, dihadapkan pada berbagai tantangan di negara-negara berkembang ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), dengan menganalisis 35 artikel relevan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Scopus, Taylor & Francis, ScienceDirect, dan Google Scholar. penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi pendidikan inklusif, seperti kesenjangan akses, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru, stigma sosial, serta hambatan bahasa dan kurikulum. Meskipun demikian, terdapat peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif melalui penguatan kebijakan, pemanfaatan teknologi, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta reformasi kurikulum yang lebih fleksibel. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai pendidikan inklusif di negara berkembang dan menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan serta kesetaraan akses pendidikan yang inklusif di negara-negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kompleks.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan Inklusif; Negara Berkembang; Multikulturalisme

Pendidikan inklusif menjadi pendekatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau dari berbagai latar belakang, memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan (Ainscow et al., 2006). Pendekatan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari komitmen global untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif (Alkhateeb et al., 2023; Arifin & Supena, 2023; Malikussaleh, 2020). Di negara berkembang yang multikultural seperti Indonesia, Malaysia dan India penerapan program pendidikan inklusif membawa tantangan yang rumit (Muhibbin & Hendriani, 2021). Keberagaman latar belakang siswa sering kali menuntut lembaga pendidikan untuk lebih adaptif dalam metode pengajaran (Tobasa & Nurjanah, 2024), kurikulum (Sahrudin et al., 2023), dan strategi pengelolaan kelas guna memenuhi kebutuhan semua peserta didik (Setiawan et al., 2020). Pendidikan inklusif di negara multikultural juga menawarkan peluang besar. Keberagaman mendorong siswa untuk belajar empati dan keterampilan sosial, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global (Neary, 2020).

Manajemen pendidikan inklusif menjadi aspek kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan inklusif (Ikramullah & Sirojuddin, 2020; Tanjung et al., 2022) di berbagai konteks multikultural. Tantangan utama dalam manajemen pendidikan inklusif di negara berkembang meliputi kesenjangan akses, kurangnya pelatihan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus dan dari berbagai latar belakang budaya, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan (Nabiela & Ulfatin, 2023; Tanjung et al., 2022). Selain itu, kebijakan pendidikan yang telah diterapkan sering kali belum diikuti dengan strategi implementasi yang kuat, terutama dalam pengawasan dan evaluasi (Jelas & Mohd Ali, 2014; Somad et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan inklusif di negara berkembang. Penguatan kebijakan dan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat meningkatkan dukungan terhadap sistem pendidikan inklusif (Gupta & Kaul, 2024). Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran inklusif juga memberikan peluang untuk menjangkau lebih banyak siswa, terutama di daerah terpencil. Selain itu, penyesuaian kurikulum dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dapat menjadi strategi untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses, tetapi juga pengalaman belajar yang bermakna bagi semua siswa (Gupta & Kaul, 2024; Hue & Karim, 2024; Mitiku et al., 2014).

Dalam perspektif agama Islam, konsep inklusivitas ini sangat sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Surah Al-Hujurat (49:13):

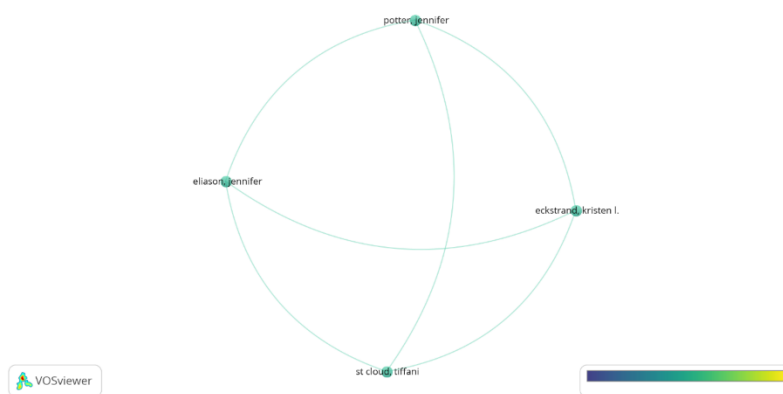
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

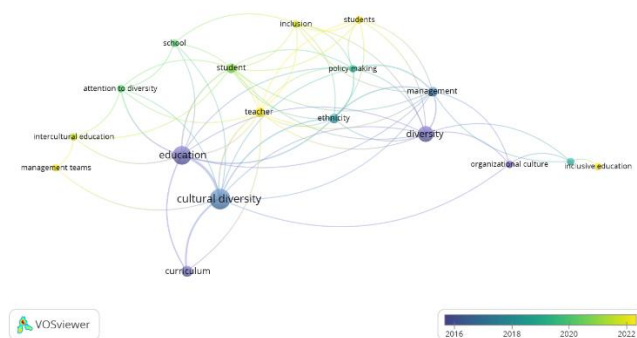
Ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman, baik dalam bentuk suku, bangsa, maupun latar belakang budaya, merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dihargai dan dipahami. Dalam konteks pendidikan inklusif, prinsip ini mengarahkan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang dapat merangkul semua perbedaan, baik itu perbedaan kemampuan akademik, kondisi fisik, maupun status sosial.

Penelitian ini akan membahas Manajemen pendidikan Inklusif di negara berkembang dalam konteks multikultural yaitu (Indonesia, India, Malaysia) khususnya tantangan dan peluang dalam pengimplementasiannya. Penelitian tentang manajemen pendidikan inklusif sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, beberapa tokoh yang melakukan penelitian tersebut terlihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tokoh-Tokoh Yang Meneliti Tentang Manajemen Pendidikan Inklusif Dalam Keanekaragaman Budaya.

Tokoh-tokoh yang terlihat dalam gambar diatas (Eckstrand et al., 2016) mengaitkan interseksionalitas dan diskriminasi dalam kedokteran, pendidikan kedokteran dan tantangan kesetaraan, kebijakan serta struktur kesehatan dan kesenjangan. Berdasarkan basis data Scopus, penelitian sebelumnya menggunakan kata kunci mengacu pada studi tentang Manajemen Pendidikan Inklusif di Negara Berkembang dalam Konteks Multikultural yang digunakan oleh para peneliti terkini sebelumnya adalah seperti terlihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Beberapa keyword yang merujuk pada manajemen pendidikan inklusif oleh para peneliti dunia (basis data Scopus).

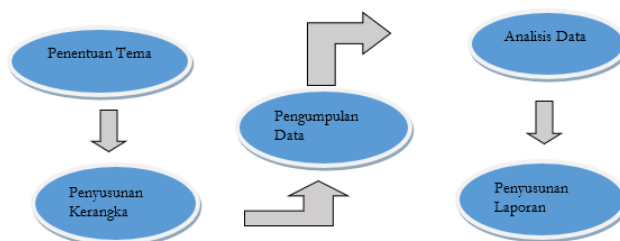
Berdasarkan basis data scopus yang dianalisis pada tanggal 27 Februari 2025 pada jam 18.09 WIB didapati research tentang Manajemen Pendidikan Inklusif dalam Keanekaragaman Budaya berjumlah 38 secara keseluruhan penelitian di berbagai negara di dunia. Beberapa negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Rumania, Rusia, Afrika Selatan, Kenya, Swiss, Cina, Spanyol, Jepang, Taiwan, Britania Raya. Research pada Negara-negara tersebut mengaitkan interseksionalitas dan diskriminasi, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, pendidikan interkultural dengan peran tim manajemen sekolah, peran kepala sekolah dalam sekolah inklusif dengan diskursus global tentang kepemimpinan inklusif, bimbingan pendidikan dan kelas adaptasi bahasa sementara dengan pendidikan interkultural bagi siswa imigran, kepemimpinan inklusif dalam manajemen sekolah dengan praktik terbaik dalam mengelola keberagaman budaya, keberagaman budaya di sekolah-sekolah publik Swaziland dengan pengelolaan pendidikan yang efektif (Eckstrand et al., 2016; Gómez-Hurtado et al., 2021; Hamid et al., 2014; Owusu-Ansah et al., 2023; Sevillano-Monje et al., 2023; Toscano-Cruz et al., 2020; Volosnikova et al., 2024).

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai manajemen pendidikan inklusif sudah cukup banyak dilakukan. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana penerapan pendidikan inklusif di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam dan perbandingan antara berbagai sistem pendidikan inklusif di negara-negara yang memiliki keragaman budaya dan etnis (Indonesia, Malaysia, India).

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana manajemen pendidikan inklusif diterapkan di negara berkembang, khususnya dalam konteks multikultural. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif serta menggali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan inklusif di negara-negara dengan keberagaman budaya yang tinggi.

METODE

Systematic Literature Review (SLR) bertujuan mengidentifikasi penelitian primer yang relevan, mengambil data penting, menganalisis, dan menggabungkan temuan untuk memperoleh wawasan mendalam dan menyeluruh dalam bidang penelitian (Bettany-Saltikov & McSherry, 2024; Van Dinter et al., 2021). Analisis bibliometrik adalah metode statistik efektif untuk meninjau penelitian di bidang pendidikan, mengelola data besar, menyebarkan hasil ilmiah, serta mengidentifikasi pola dan kekurangan penelitian. Melalui analisis kualitatif informasi tentang manajemen pendidikan inklusif di negara berkembang dapat dipetakan (Barbosa & Galembeck, 2022).



Gambar 3. Langkah-Langkah Tinjauan Pustaka Oleh Bettany-Saltikov

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan penentuan tema untuk menentukan fokus utama penelitian. Tahap berikutnya adalah penyusunan kerangka penelitian yang mencakup perumusan masalah, tujuan, dan kerangka konseptual. Setelah itu, pengumpulan data yang bersumber dari scopus, taylor and francis online, sciencedirect dan google scholar. Data yang diperoleh berjumlah 35 artikel relevan, dianalisis secara mendalam untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Penelitian ini diakhiri dengan penyusunan laporan yang mencakup hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi untuk memberikan kontribusi ilmiah pada bidang yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi manajemen pendidikan inklusif di Indonesia, Malaysia, dan India bervariasi, dengan kebijakan yang sudah ada namun masih menghadapi tantangan signifikan. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pendidikan inklusif di Negara Indonesia, Malaysia, dan India, seperti terlihat pada tabel 1:

Tabel 1. Efektivitas Pendidikan Inklusif di Indonesia, Malaysia dan India dalam Konteks Multikultural

Aspek	Indonesia	Malaysia	India
Manajemen Pendidikan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 adalah peraturan yang mengatur tentang wajib belajar. Membuat RPP, kurikulum dan PPI yang disesuaikan dengan ABK. Membentuk tim untuk pendidikan inklusif serta pembagian GPK untuk mendampingi ABK. Pembelajaran berbasis individual. Penyediaan fasilitas ramah ABK dan alat bantu belajar ABK. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah: <i>Education Act</i> 1996, <i>Zero Reject Policy</i> 2019, dan <i>Pelan Pembangunan Pendidikan</i> Malaysia (PPPM) 2013-2025. Menganalisis kebutuhan ABK. Membuat kurikulum yang fleksibel dengan ABK. Penerapan pembelajaran adaptif dan 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah <i>Sarva Shiksha Abhiyan</i> (SSA) dan NEP 2004. Identifikasi kebutuhan ABK. Kurikulum di sesuaikan dengan kebutuhan ABK. Evaluasi berbasis bukti. Komite manajemen sekolah memastikan keberlanjutan program pendidikan inklusif.

	6. Evaluasi oleh Kepala Sekolah dilakukan secara berkala.	pendekatan kontribusi.	5. Evaluasi dilakukan dengan penilaian akademik dan observasi perkembangan sosial ABK.
Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan akses di daerah multikultural masih sangat tinggi. 2. Kurangnya guru yang memahami pendidikan inklusif dan keberagaman budaya membuat sekolah sulit mengadaptasi metode pembelajaran untuk ABK dan siswa kelompok minoritas. 3. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap ABK serta siswa dari kelompok minoritas. 4. Minimnya fasilitas dan tenaga pendidik khusus di daerah terpencil. 5. Kebijakan pendidikan inklusif sudah ada, namun implementasi dan pengawasan di daerah pedesaan masih lemah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran guru. 2. Lingkungan sekolah yang homogen dan kurangnya interaksi antar budaya. 3. Sikap dan persepsi negatif terhadap keberagaman. 4. Kurangnya sumber daya dan dukungan pemerintah. 5. Fokus berlebihan pada akademik dan kurangnya fleksibilitas kurikulum. 6. Hambatan bahasa dalam pembelajaran. 7. Kurangnya dukungan orang tua dan komunitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan sosial, kasta, dan agama dalam akses pendidikan masih berdampak besar pada pendidikan inklusif. 2. Hambatan bahasa dan kurikulum yang tidak inklusif. 3. Sebagian besar guru tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani keberagaman budaya dan disabilitas. 4. Ketimpangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan inklusif. 5. Stigma sosial dan lemahnya implementasi kebijakan inklusif.
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di daerah yang kurang terjangkau. 2. Pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan inklusif di daerah terpencil dan masyarakat adat. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan inklusif untuk mengurangi stigma ABK. 4. Pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lokal untuk meningkatkan efektivitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah. 2. Keanekaragaman budaya sebagai sumber pembelajaran. 3. Potensi kolaborasi antar lembaga pendidikan dan LSM. 4. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran inklusif. 5. Peningkatan kesadaran dan perubahan sikap terhadap inklusivitas. 6. Reformasi kurikulum dan pendekatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi kebijakan dan komitmen pemerintah dengan Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas 2016 dan <i>Sarva Shiksha Abhiyan</i> (SSA). 2. Kemajuan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan inklusif. 3. Meningkatnya kesadaran sosial tentang pendidikan inklusif dan multikultural. 4. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, LSM dan sektor swasta. 5. Potensi penyesuaian kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural.

-
- | | |
|--|---|
| 5. Kerjasama antara sekolah, pemerintah dan organisasi non-pemerintah. | 7. Dukungan dari komunitas sekolah dan orang tua. |
|--|---|
-

PEMBAHASAN

Manajemen Pendidikan Inklusif

Pemerintah Indonesia menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), melalui PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Hanjarwati & Aminah, 2014; Susilowati et al., 2022). Perencanaan pendidikan inklusif dimulai dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kurikulum, dan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK (Bahri, 2022; Susilowati et al., 2022; Wiliyanto, 2022). Untuk mendukung pembelajaran yang efektif, dibentuk tim pendidikan inklusif serta dialokasikan Guru Pendamping Khusus (GPK) pada ABK (Bahri, 2022; Ikramullah & Sirojuddin, 2020; Susilowati et al., 2022; Wiliyanto, 2022). Pembelajaran berbasis individual diterapkan untuk menyesuaikan metode belajar dengan kemampuan masing-masing siswa (Bahri, 2022; Susilowati et al., 2022). Fasilitas yang ramah ABK dan alat bantu belajar juga perlu disediakan guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Bahri, 2022; Wiliyanto, 2022). Proses pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dengan evaluasi secara berkala untuk memastikan program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi ABK (Ikramullah & Sirojuddin, 2020; Susilowati et al., 2022; Wiliyanto, 2022).

Kebijakan pendidikan inklusif di Malaysia, termasuk *Education Act 1996*, *Zero Reject Policy 2019*, dan *Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025* (Amin & Yasin, 2016; Chin, 2023; Jelas & Mohd Ali, 2014), yang menegaskan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Analisis kebutuhan ABK menjadi langkah awal dalam memahami tantangan dan potensi mereka (Mutaqin et al., 2024). Kurikulum yang fleksibel dirancang agar sesuai dengan kebutuhan individu ABK, memungkinkan mereka untuk belajar dengan metode yang lebih adaptif (Amin & Yasin, 2016; Mutaqin et al., 2024; Salleh, 2018). Penerapan pembelajaran adaptif dan pendekatan kontribusi juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap ABK dapat terlibat aktif dalam proses belajar dengan dukungan strategi yang disesuaikan (Mutaqin et al., 2024; Phoon et al., 2013). Evaluasi pendidikan tidak hanya dilakukan melalui penilaian akademik tetapi juga observasi perkembangan sosial mereka, guna memastikan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari aspek sosial dan emosional mereka (Amin & Yasin, 2016).

kebijakan pendidikan inklusif di India, khususnya *Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)* dan *National Education Policy (NEP) 2004* (Bala, 2024; Singal, 2019) yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Langkah awal dalam implementasi kebijakan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan ABK guna memahami hambatan serta potensi mereka dalam pembelajaran (Padmanabhan, 2023). Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan

individu ABK agar mereka dapat belajar secara optimal dengan pendekatan yang lebih inklusif (Gale et al., 2022; Munastiwi, 2024; Padmanabhan, 2023) Evaluasi berbasis bukti diterapkan untuk menilai efektivitas metode pembelajaran, baik dari segi akademik maupun perkembangan sosial-emosional siswa (Gale et al., 2022). Komite manajemen sekolah berperan dalam memastikan keberlanjutan program pendidikan inklusif ini dengan mengawasi implementasi kebijakan serta menyediakan dukungan yang dibutuhkan agar inklusivitas dalam pendidikan dapat terjaga secara berkelanjutan (Singh & Chauhan, 2021).

Tantangan dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih terkendala kesenjangan akses, terutama di daerah pedesaan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, yang minim sekolah inklusif dan fasilitas ramah difabel (Hanjarwati & Aminah, 2014; Kusmaryono, 2023; Sulistyadi, 2014; Warminda et al., 2022). Selain itu bahasa juga menjadi kendala bagi ABK yang bahasa ibunya bukan Bahasa Indonesia (Mariyono, 2024). Sebagian besar guru belum terlatih dalam mengajar kelas inklusif dan keberagaman budaya, dengan pelatihan yang masih bersifat teoritis (Mujiati & Yoenanto, 2023; Musyafira & Hendriani, 2021; Nabiela & Ulfatin, 2023; Rahmi et al., 2024). Banyak orang tua lebih memilih SLB karena kekhawatiran akan kualitas pembelajaran di sekolah inklusif (Hanjarwati & Aminah, 2014; Warminda et al., 2022). Perbedaan budaya dan agama menimbulkan diskriminasi bagi siswa minoritas (Baihaqi, 2021; Riswari et al., 2022; Somad et al., 2024). Meski kebijakan pendidikan inklusif sudah ada, implementasi belum optimal akibat kurangnya standar operasional dan dukungan finansial (Baihaqi, 2021; Hanjarwati & Aminah, 2014; Riswari et al., 2022; Somad et al., 2024; Warminda et al., 2022).

Penerapan program pendidikan inklusif di Malaysia masih memiliki tantangan dalam pengimplementasiannya yaitu masih banyak guru kurang memahami tentang inklusivitas dan multikulturalisme (Ahmad & Yusof, 2017; Phoon et al., 2013). Sekolah homogen menyulitkan pengajaran keberagaman, sementara prasangka dan sikap eksklusif orang tua masih kuat (Ahmad & Yusof, 2017; Jelas & Mohd Ali, 2014; Phoon et al., 2013; Tembren & Tahar, 2022). Kurangnya sumber daya seperti bahan ajar dan tenaga pendidik yang terlatih menjadi tantangan tersendiri (Amin & Yasin, 2016; Salleh, 2018). Selain itu, dukungan administratif yang tidak merata di daerah perkotaan dan pedesaan (Tembren & Tahar, 2022). Sistem pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik dan ujian nasional sehingga pendidikan karakter dan multikultural sering di abaikan (Abol & Nordin, 2023). Perbedaan bahasa sering kali menghambat proses pembelajaran, terutama bagi siswa yang tidak menguasai bahasa pengantar yang digunakan (Ahmad & Yusof, 2017; Phoon et al., 2013). Para orang tua lebih memilih sekolah segregatif atau berbasis agama daripada pendidikan inklusif (bin Nordin et al., 2019; Jelas, 2010).

Sistem kasta masih mempengaruhi pendidikan inklusif di India, dengan kelompok Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), dan Other Backward Classes (OBC) mengalami diskriminasi dan

keterbatasan akses di sekolah negeri, sementara kasta atas lebih banyak mengakses sekolah swasta elit (Haq et al., 2020; Singal, 2019). Kelompok agama minoritas (Muslim, Kristen, Sikh, Jain) juga menghadapi hambatan dalam sekolah berbasis agama, diperparah oleh ketegangan dan segregasi berbasis keyakinan (Haq et al., 2020; Munastiwi, 2024). India memiliki lebih dari 22 bahasa resmi dan ratusan dialek yang menciptakan tantangan dalam menyediakan pendidikan inklusif yang dapat diakses oleh semua siswa (Gupta & Kaul, 2024). Anak dari komunitas minoritas dan berkebutuhan khusus kesulitan memahami kurikulum yang di ajarkan dalam bahasa mayoritas (Hindi atau Inggris) sehingga tidak fleksibel untuk ABK (Gupta & Kaul, 2024; Munastiwi, 2024; Singal, 2019). Sebagian besar guru tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani keberagaman budaya dan disabilitas (Bala, 2024; Singal, 2019), selain itu pelatihan yang diberikan masih bersifat teoritis (Munastiwi, 2024). Akibatnya guru kesulitan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang benar benar inklusif (Haq et al., 2020). Sekolah negeri di pedesaan masih kekurangan fasilitas dasar bagi disabilitas, sementara infrastruktur yang ada sering tidak terawat (Singal, 2019). Teknologi mulai diterapkan dalam pendidikan inklusif, tetapi aksesnya terbatas di pedesaan karena kendala jaringan dan kurangnya keterampilan guru dalam teknolog (Gupta & Kaul, 2024). Meski kesadaran meningkat, stigma terhadap penyandang disabilitas masih kuat, terutama di pedesaan (Haq et al., 2020; Singal, 2019).

Peluang dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif terlepas dari berbagai tantangan yang muncul adapula berbagai peluang untuk implementasi pendidikan inklusif agar lebih efektif yaitu kebijakan pemerintah Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dapat mendukung pendidikan inklusif. Selain itu peraturan Walikota dan Gubernur di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Sidoarjo juga mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif (Hanjarwati & Aminah, 2014; Sulistyadi, 2014) Pemanfaatan teknologi harus lebih ditingkatkan dan sistem jaringan internet di pedesaan diperbaiki lagi agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan merata dan optimal sampai ke daerah yang terpencil atau pedesaan (Baihaqi, 2021; Riswari et al., 2022; Somad et al., 2024). Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung efektivitas pendidikan inklusif, oleh sebab itu kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran masyarakat bisa dengan melalui kampanye sosial dari organisasi masyarakat, program komunitas berbasis budaya, dan sekolah yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam sosialisasi pendidikan inklusif (Mariyono, 2024; Rahmi et al., 2024; Warminda et al., 2022). Kurikulum pendidikan inklusif harus menyesuaikan dengan karakteristik budaya lokal misalnya dengan metode pembelajaran berbasis budaya dan bahasa daerah untuk siswa ABK (Baihaqi, 2021; Somad et al., 2024). Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah dan LSM dapat mempercepat pengembangan pendidikan inklusif yang lebih merata di Indonesia (Nabiela & Ulfatin, 2023; Riswari et al., 2022; Sulistyadi, 2014).

Malaysia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif, seperti Education Act 1996, Zero Reject Policy 2019, dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 (Amin & Yasin, 2016; bin Nordin et al., 2019; Chin, 2023; Tembren & Tahar, 2022). Keberagaman etnis di Malaysia dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang kaya agar siswa belajar nilai-nilai toleransi, kerja sama dan saling menghormati (Ahmad & Yusof, 2017; Phoon et al., 2013). Banyak organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga internasional yang mendukung pendidikan inklusif di Malaysia, baik melalui penyediaan sumber daya, pelatihan guru, maupun advokasi kebijakan (Jelas & Mohd Ali, 2014; Salleh, 2018). Kemajuan teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif seperti e-learning, AI (Artificial Intelligence), text-to-speech pada proses pembelajaran (Ahmad & Yusof, 2017; Chin, 2023) Media sosial dan kampanye kesadaran dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan sikap terhadap siswa berkebutuhan khusus dan kelompok minoritas lainnya (Ahmad & Yusof, 2017; Amin & Yasin, 2016). Pemerintah Malaysia sedang mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan (Ahmad & Yusof, 2017; Jelas & Mohd Ali, 2014). Selain itu, semakin banyak sekolah yang menyadari pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusif (Amin & Yasin, 2016; Phoon et al., 2013).

Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas 2016 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pendidikan inklusif, dengan menegaaskan bahwa siswa penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan hingga 18 tahun di sekolah reguler (Singal, 2019). Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) telah menjadi inisiatif utama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, melalui pendekatan “Zero Rejection Policy” yang memastikan tidak ada anak yang tertinggal (Singal, 2019). Pemerintah juga sudah memulai memperbanyak pelatihan guru dan infrastruktur sekolah inklusif yang membantu menciptakan lingkungan lebih ramah bagi siswa disabilitas (Haq et al., 2020). Pemanfaatan teknologi seperti e-learning, AI (Artificial Intelligence), dan alat bantu digital dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif bagi ABK dan dengan pengembangan aplikasi pembelajaran dapat mengatasi permasalahan bahasa daerah untuk siswa dari latar belakang multikultural (Gupta & Kaul, 2024). Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif berkat kampanye publik, peran media dan keterlibatan organisasi non-pemerintah (Haq et al., 2020; Munastiwi, 2024; Singal, 2019). Kerjasama antara organisasi non-pemerintah dengan sekolah mendukung implementasi pendidikan inklusif dengan penyediaan alat bantu belajar, pelatihan guru, maupun advokasi kebijakan (Singal, 2019). Perusahaan teknologi India juga membantu meningkatkan akses dengan pengembangan alat bantu digital untuk pendidikan inklusif (Gupta & Kaul, 2024; Haq et al., 2020). Kurikulum di India mulai mengalami reformasi untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan kebutuhan siswa disabilitas dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis pengalaman (Munastiwi, 2024). Beberapa sekolah sudah mulai mengadopsi pendekatan bilingual dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa dari kelompok minoritas bahasa untuk memahami materi (Gupta & Kaul, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti implementasi manajemen pendidikan inklusif di negara berkembang dengan keberagaman budaya yang tinggi, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan India. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diadopsi, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesenjangan akses, kurangnya pelatihan guru, keterbatasan infrastruktur, stigma sosial, serta hambatan bahasa dan kurikulum. Namun, peluang seperti penguatan kebijakan, pemanfaatan teknologi, sinergi antar pemangku kepentingan, reformasi kurikulum, dan peningkatan kesadaran sosial dapat mengoptimalkan pendidikan inklusif. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, sistem pendidikan yang lebih adil dan adaptif terhadap keberagaman dapat terwujud di negara berkembang.

SARAN

Penelitian selanjutnya perlu menggali dampak kebijakan pendidikan inklusif di daerah dengan keberagaman budaya dan faktor lokal yang mempengaruhi implementasinya. Fokus juga harus pada peran masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif serta penerapan teknologi di daerah dengan keterbatasan akses. Selain itu, pembaruan kebijakan dan pelatihan pengajar sangat diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif lebih efektif dan merata.

DAFTAR RUJUKAN

- Abol, M. T., & Nordin, Z. S. (2023). Kepelbagaian Gaya Pembelajaran Murid Kurang Upaya Intelektual dalam Program Pendidikan Inklusif di Sarawak. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(12), e002599–e002599.
- Ahmad, Y., & Yusof, N. M. (2017). Multi-ethnic school environment from the school leader's perspective: challenges and approaches to improve multi-cultural competency among teachers in Malaysia. *Asian Ethnicity*, 18(3), 296–309.
- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203967157>
- Alkhateeb, N., Alrubaiyan, A., & Tamakloe, D. (2023). A dialogical inquiry of elementary school teachers' perspectives on inclusive education of students with special education needs and disability (SEND). *Sage Open*, 13(2), 21582440231162056.
- Amin, N. M., & Yasin, M. H. M. (2016). Pelaksanaan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. *Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas Rantau Asia Tenggara Siri Ke, 6*.
- Arifin, F., & Supena, A. (2023). *Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*. 9(1), 198–208. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4191>
- Bahri, S. (2022). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94–100.
- Baihaqi, M. (2021). Implementation of multicultural education in Indonesia. *EDUTECH: Journal of Education and Technology*, 4(3), 504–526.
- Bala, S. (2024). Fostering Multicultural Education in India: Prospect Under NEP 2020. *Jagannath University Journal of Research and Review*, 01(01), 42–46.
- Barbosa, M. L. de O., & Galembeck, E. (2022). Mapping research on biochemistry education: A bibliometric analysis. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 50(2), 201–215.
- Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2024). *How to do a Systematic Literature Review in Nursing: A Step-by-Step Guide*, 3/e.

- bin Nordin, M. N., Mustafa, M. Z. Bin, & Razzaq, A. (2019). The Practice of Headmasters' Leadership and Its Effect on Job Satisfaction of Special Education Integration Program (PPKI) Teachers in Johor, Malaysia. *Universal Journal of Educational Research*, 7(9), 2008–2014.
- Chin, M. (2023). The Zero Reject policy: a way forward for inclusive education in Malaysia? *International Journal of Inclusive Education*, 27(4), 526–540.
- Eckstrand, K. L., Eliason, J., Cloud, T. S., & Potter, J. (2016). The priority of intersectionality in academic medicine. *Academic Medicine*, 91(7), 904–907.
- Gale, L., Bhushan, P., Eidnani, S., Graham, L., Harrison, M., McKay-Brown, L., Pande, R., Shreeraman, S., & Sivashunmugam, C. (2022). Overcoming barriers to inclusion in education in India: A scoping review. *Social Sciences & Humanities Open*, 5(1), 100237.
- Gómez-Hurtado, I., Valdés, R., González-Falcón, I., & Jiménez Vargas, F. (2021). Inclusive leadership: Good managerial practices to address cultural diversity in schools. *Social Inclusion*, 9(4), 69–80.
- Gupta, M., & Kaul, S. (2024). AI in Inclusive Education: A Systematic Review of Opportunities and Challenges in the Indian Context. *MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices*, 429–461.
- Hamid, M. Z., Bisschoff, C., & Botha, C. (2014). The Identification of Cultural Diversity Factors in Swaziland's Public Schools. *Mediterranean Journal Os Social Sciences*, 5.
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta mengenai pendidikan inklusi. *Inklusi*, 1(2), 221–248.
- Haq, R., Klarsfeld, A., Kornau, A., & Ngunjiri, F. W. (2020). Diversity in India: Addressing caste, disability and gender. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 39(6), 585–596.
- Hue, M. T., & Karim, S. (2024). Developing a sense of belonging among ethnic minority youth in Hong Kong: challenges and opportunities. *International Journal of Comparative Education and Development*, 26(1), 56–75.
- Ikramullah, I., & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139.
- Jelas, Z. M. (2010). Learner diversity and inclusive education: A new paradigm for teacher education in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 7, 201–204.
- Jelas, Z. M., & Mohd Ali, M. (2014). Inclusive education in Malaysia: Policy and practice. *International Journal of Inclusive Education*, 18(10), 991–1003.
- Kusmaryono, I. (2023). Faktor berpengaruh, tantangan, dan kebutuhan guru di sekolah inklusi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 12–23.
- Malikussaleh, U. (2020). *Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen (Implementation of the Inclusive Education Program in Bireuen District)*. 02, 150–160.
- Mariyono, D. (2024). Indonesian mosaic: the essential need for multicultural education. *Quality Education for All*, 1(1), 301–325.
- Mitiku, W., Alemu, Y., & Mengsitu, S. (2014). Challenges and opportunities to implement inclusive education. *Asian Journal of Humanity, Art and Literature*, 1(2), 118–135.
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia: literature review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92–102.
- Mujiati, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 1108–1116.
- Munastiwi, E. (2024). Implementing Multicultural Education in Early Childhood: A Case Study of Abdullah School, Aligarh, India. *Global Educational Research Review*, 1(3), 135–144.
- Musyafira, I. D., & Hendriani, W. (2021). Sikap guru dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1), 75–85.
- Mutaqin, Z., Yatim Riyanto, M. S., Khamidi, A., & Amalia, K. (2024). Implementation of Multi-Level Inclusive Learning Management in Indonesian Schools of Kinabalu City Malaysia. *Edukasi*, 18(2).
- Nabiela, H. S., & Ulfatin, N. (2023). Inclusive Education Policy In Indonesia: Best Practices, Challenges, And Future Directions. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(6), 1007–1012.

- Neary, A. (2020). Critical imaginaries of empathy in teaching and learning about diversity in teacher education. *Teaching Education*, 31(4), 444–458.
- Owusu-Ansah, S., Tripp, R., N. Weisberg, S., P. Mercer, M., Whitten-Chung, K., & NAEMSP Diversity & Inclusion Committee, E. (2023). Essential principles to create an equitable, inclusive, and diverse EMS workforce and work environment: a position statement and resource document. *Prehospital Emergency Care*, 27(5), 552–556.
- Padmanabhan, R. (2023). *Developing Inclusive Practices: Case Study of the Model of Inclusion, Management and Leadership in a School in Bengaluru, India*.
- Phoon, H. S., Abdullah, M. N. L. Y., & Abdullah, A. C. (2013). Multicultural early childhood education: practices and challenges in Malaysia. *The Australian Educational Researcher*, 40, 615–632.
- Rahmi, I., Desvianti, E., Mufitasari, D., & Ariyanti, T. D. (2024). Evaluation of inclusive education in Indonesia: Elementary school teachers' perspective. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 15(1), 75.
- Riswari, F., Puspitasari, F. H., Yuniarti, N., Iswahyudi, S. R., Sunandar, A., Ediyanto, E., & Junaidi, A. R. (2022). The management gaps toward inclusive education implementation at higher education in Indonesia. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 9(1), 153–162.
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Sukung, A. (2023). Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 162–179.
- Salleh, S. F. (2018). Masalah pengajaran guru dalam program pendidikan inklusif di sekolah. *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), 243–263.
- Setiawan, H., Aji, S. M. W., & Aziz, A. (2020). *Tiga Tantangan Guru Masa Depan Sekolah Dasar Inklusif 1*. 5, 241–251.
- Sevillano-Monje, V., Martín-Gutiérrez, Á., & León-Sánchez, M. (2023). Comparative analysis of intercultural education from the perspective of management teams. The case of Spain and France. *Croatian Journal of Education: Hrvatski Časopis Za Odgoj i Obrazovanje*, 25(2), 701–735.
- Singal, N. (2019). Challenges and opportunities in efforts towards inclusive education: reflections from India. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 827–840. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1624845>
- Singh, V. K., & Chauhan, S. C. (2021). Managing Inclusive Schools in India: A Study Managing Inclusive Schools in India: A Study of School Management Committees in Tribal Concentrated Districts of Jharkhand and Chhattisgarh. *Journal of Educational Planning and Administration*, 35(1), 59–83.
- Somad, A., Haryanto, S., & Darsinah, D. (2024). Inclusive Education for Special Needs Students in Indonesia: A Review of Policies, Practices and Challenges. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 9(2), 1024–1035.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Susilowati, T., Trisnamansyah, S., & Syaodih, C. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 920–928.
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi pada lembaga pendidikan Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339–348.
- Tembren, A., & Tahar, M. M. (2022). Penerimaan guru terhadap pelaksanaan program pendidikan khas integrasi (PPKI) di daerah Sibul. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(1), 127–144.
- Tobasa, M. R., & Nurjanah, P. W. (2024). Tantangan dan Strategi Mendisiplinkan Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif: Tinjauan dari Perspektif Studi Literatur. *ANWARUL*, 4(1), 207–217.
- Toscano-Cruz, M. de la O., González-Falcón, I., Gómez-Hurtado, I., & García Rodríguez, M. del P. (2020). Educational Counseling and Temporary Language Adaptation Classrooms: A Study through In-Depth Interviews. *Sustainability*, 12(24), 10433.
- Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2021). Automation of systematic literature reviews: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 136, 106589.
- Volosnikova, L. M., Fedina, L. V., & Bruk, Z. Y. (2024). Positions of Leaders—Principals of Inclusive Schools: Foreign Discourse. *СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY*, 23.
- Warminda, Y., Hasrul, H., & Haryani, M. (2022). Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun

2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang. *Jurnal Basicedu*. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/4047>
Wiliyanto, N. R. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 1 Padangan. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 144–152.